

ABSTRAK

Model yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya adanya program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan pendidikan, Sosial maupun Budaya. Untuk mengimplementasikan model tersebut maka pemerintah Sidoarjo mengambil langkah-langkah strategis melalui : (1) Memberdayakan keluarga dalam penyadaran dan pembelajaran sejak dini mengenai hak-hak perempuan dan anak agar mereka mampu bersaing tanpa harus dibeda-bedakan.(2) Membangun sinergisitas dengan legislatif agar setiap penyusunan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan kesejahteraan keluarga.(3) Memberdayakan potensi budaya lokal agar terjalin keharmonisan keluarga (4) Memperkuat koordinasi, sinkronisasi antara seluruh SKPD dan pihak terkait dalam upaya penanggulangan KDRT (5) Membangun jejaring kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta untuk berperan aktif mewujudkan keluarga harmonis. Dalam penelitian ini disarankan, masih perlu terus untuk dilakukan sosialisasi ke masyarakat terutama kepada masyarakat kelas bawah yang secara sosial ekonomi, serta dikalangan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak pidana KDRT. Perlu adanya skala prioritas program yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi pemicu tingginya angka tindak terutama program pemberdayaan ekonomi keluarga ataupun perempuan. Model dalam penelitian ini dapat dipakai sebagai pilot ProjeKt bagi kabupaten/pemerintah kota lainnya di Indonesia; sehingga dapat diharapkan secara simultan dan konstruktif tindak KDRT semakin lama akan semakin menurun

Key Word: Gender, Model

ABSTRACT

The model presented in this study is the need of the programs related to family economic improvement, improvement pendidikan, Social and Cultural Rights. To implement the model is the government's Sidoarjo take strategic measures through: (1) Empowering families in early learning and awareness about the rights of women and children so that they can compete without having to be differentiated. (2) Building a synergy with the legislature to each charge of drafting local regulations consider the interests of family welfare. (3) Empower local cultural potential in order to knit the family harmony (4) Strengthening the coordination, synchronization between all SKPD and stakeholders in the response to domestic violence (5) Building a network of cooperation of all parties including government, community private, to actively realize the harmonious family. In this study suggested, still need to continue to do socialization into the community, especially to lower-class communities that are socio-economic, as well as among women and children who are vulnerable to criminal acts of domestic violence. It needs a program priorities relating to the factors that trigger high rates of follow-terutama program family or women's economic empowerment. The model in this study can be used as a pilot project for districts / municipalities in Indonesia; so it can be expected, to simultaneously and constructive acts of domestic violence will decrease the longer

Key Word: Gender, Model